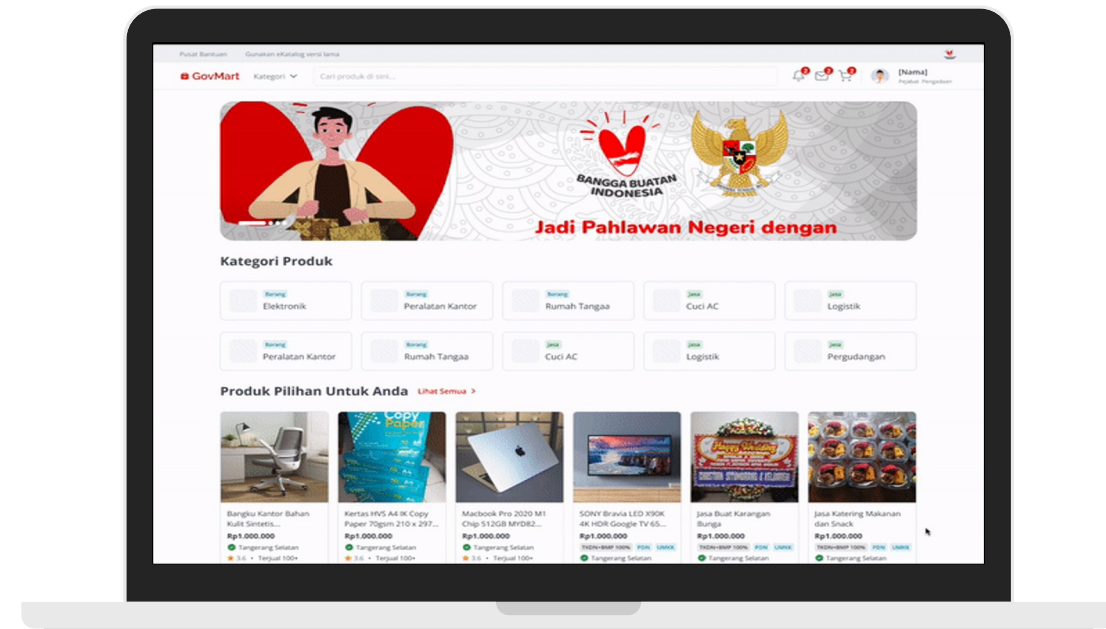


UMKM GO DIGITAL PRODUK LOKAL GO NASIONAL

Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital



TANTANGAN EKONOMI INDONESIA

MENDORONG PELAKU UMKM NAIK KELAS DENGAN GO DIGITAL

**HINGGA TAHUN 2023 BARU
33,6% UMKM RI GO DIGITAL**
(equivalent 22 Juta Pelaku UMKM)

ALASAN UMKM INDONESIA TIDAK GO DIGITAL :

● 60% UMKM DI INDONESIA MERASA TIDAK BUTUH IMPLEMENTASI DIGITAL DALAM MENGELOLA USAHA

● UMKM TIDAK MEMAHAMI BESARNYA POTENSI PASAR DALAM EKOSISTEM DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA

● UMKM MERASA KESULITAN MENGOPERASIKAN PERANGKAT DIGITAL YANG DIPERLUKAN DALAM EKOSISTEM DIGITAL



● **TIDAK MAU?**

● **TIDAK TAHU?**

● **TIDAK MAMPU?**

PENTINGNYA EKSISTENSI UMKM

DALAM MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI DI INDONESIA

TAHUN 1997 TERJADI KRISIS EKONOMI GLOBAL, TERUTAMA DI WILAYAH ASIA



tempo.co Cari Berita

BICARA FAKTA

Terbaru Terpopuler Pemilu Baru News

Krisis Ekonomi Sapu Asia di 1997

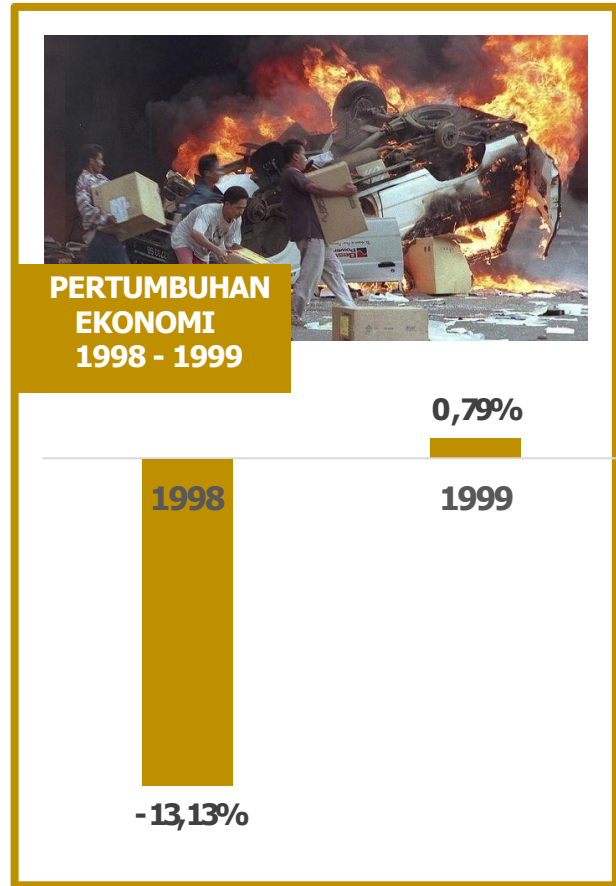
Reporter: Idris Boufakar Editor: Dwi Arjanto

Senin, 15 Agustus 2022 20:10 WIB



Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Im

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MEROSOT DAN LAMA UNTUK BANGKIT



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA CENDERUNG STABIL MESKI TERJADI KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19



KOMITMEN PRO PDN dan PRODUK UMK-K MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Staf Kepresidenan;
 4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :

3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

**PRODUK UMK-K \geq 40% DARI TOTAL SELURUH
NILAI ANGGARAN BELANJA BARANG/JASA**

7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.

**PENGGUNAAN PRODUK IMPOR \leq 5%
PADA TAHUN 2023 (PDN \geq 95%)**

PRINSIP PENGADAAN PEMERINTAH

DALAM MENDUKUNG PELAKU USAHA LOKAL, KHUSUSNYA UMK-KOPERASI

**RENCANA UMUM
PENGADAAN**



PROSES REALISASI ANGGARAN



**MELIBATKAN
PELAKU USAHA
LOKAL**



PELAKU USAHA LOKAL

**MANFAAT PEMBANGUNAN
DIRASAKAN MASYARAKAT**



**MENGGERAKKAN
EKONOMI LOKAL
DAN NASIONAL**

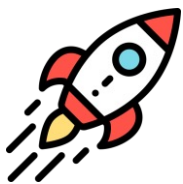
**MEMBUKA
LAPANGAN
KERJA**

**MENDONGKRAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI**



KENAPA E-KATALOG?

DAPAT MENINGKATKAN PENGGUNAAN PDN dan PRODUK UMK-K



Proses Transaksi Relatif Cepat



*Produk Tayang Ditampilkan Lengkap
Dengan Keterangan TKDN, PDN, UMK-K*



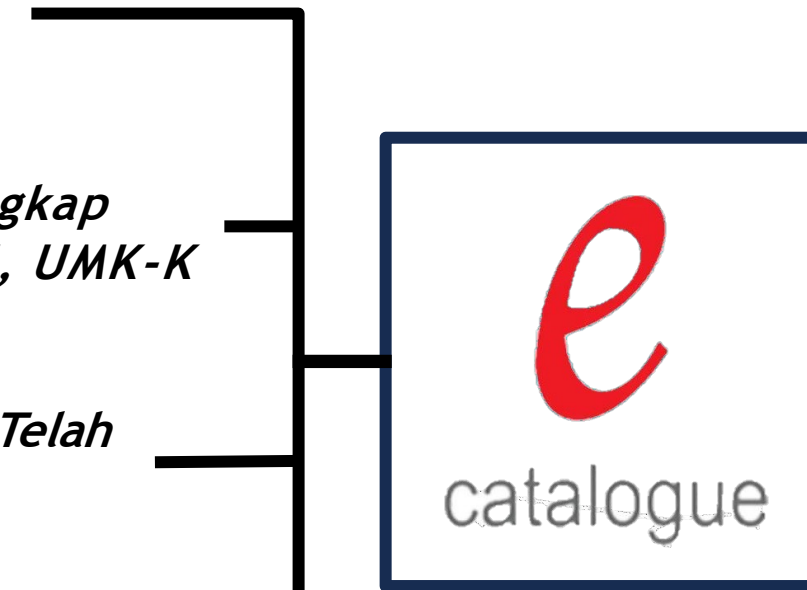
*Pembekuan Produk Impor Jika Telah
Terdapat PDN Sebagai Substitusi*



AUDIT

*Terdapat Fitur E-Audit Untuk
Memastikan Proses Transaksi
Bersih / Bebas dari Prakti KKN*

pada pengembangan e-katalog versi 6



PLATFORM PBJ PEMERINTAH

**BELANJA TEPAT
CARA CEPAT**

FITUR E-AUDIT

UNTUK MEMASTIKAN PROSES PENGADAAN BEBAS DARI PRAKTIK KKN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Cegah Kecurangan di Katalog Elektronik, LKPP Rilis Pengawasan e-Audit

Redaksi DDTNews | Kamis, 07 Maret 2024 | 16:10 WIB



Ilustrasi (foto: LKPP)

JAKARTA, DDTNews - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi meluncurkan fitur pengawasan e-audit untuk mencegah kecurangan pada katalog elektronik. Peluncuran dilakukan pada Rabu (6/3/2024).

4 FITUR DETEKSI DALAM E-AUDIT



PEMBELIAN BERULANG DENGAN PENYEDIA YANG SAMA / TERAFILIASI



PEMBELIAN PADA PRODUK YANG BARU SAJA DITAYANGKAN



PROSES KESEPAKATAN / NEGOSIASI YANG RELATIF CEPAT / INSTANT



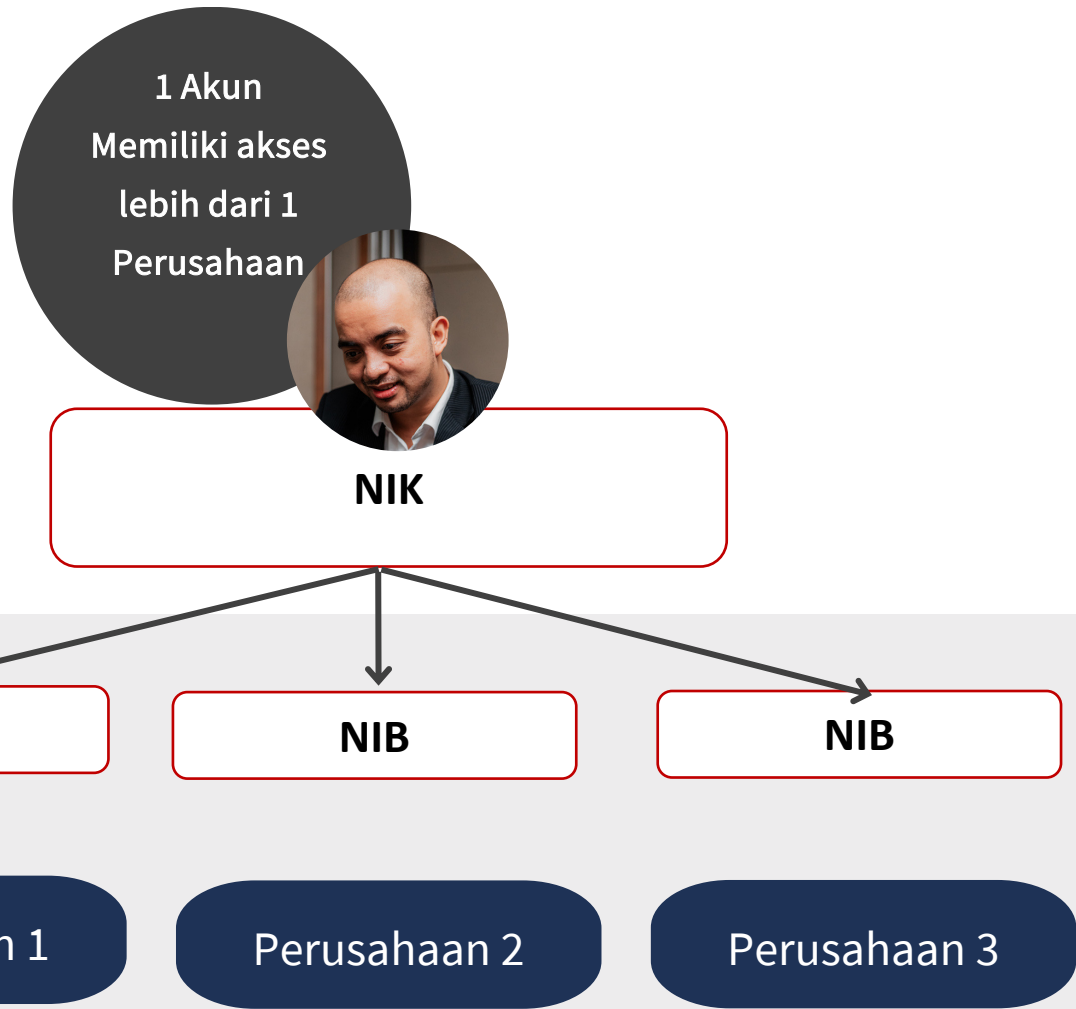
PENAIKKAN HARGA YANG TIDAK WAJAR DALAM TRANSAKSI



TRANSFORMASI KATALOG ELEKTRONIK

Manajemen Akun PPN

Pendaftaran Akun Penyedia



Proses Verifikasi 3 Lapis

- Data identitas digital seperti email & nomor handphone (melalui OTP berlapis)
- Data profil di kehidupan nyata seperti NIK (melalui integrasi ke Dukcapil & *liveness e-KYC*)
- Data perusahaan seperti NIB, NPWP, Rekening Bank & berbagai data lainnya (melalui verifikasi dengan petugas verifikator)

Manajemen Akun PPN

Pendaftaran Akun Pembeli (PP/PPK)



(Pejabat Pengadaan (PP))



(Pejabat Pembuat Komitmen (PPK))



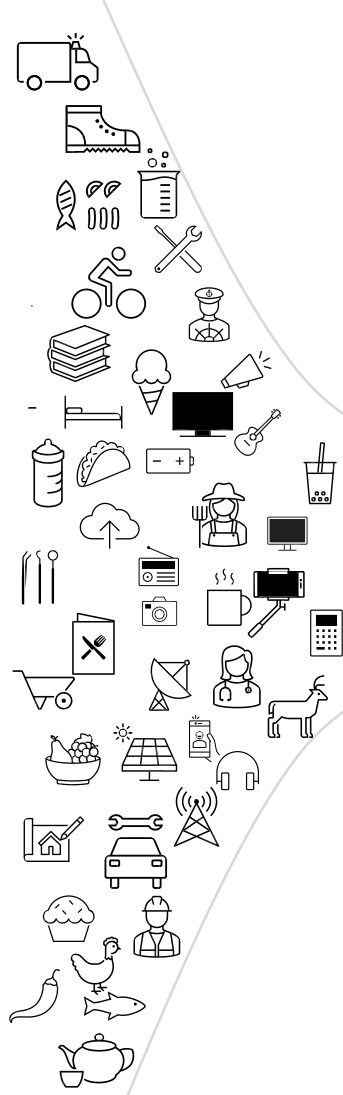
Tidak lagi mendaftar melalui LPSE

Proses Verifikasi 3 Lapis

- Data identitas digital seperti email & nomor handphone (melalui OTP berlapis)
- Data profil di kehidupan nyata seperti NIK (melalui integrasi ke Dukcapil & *liveness e-KYC*)
- Data peran seperti NIP/NRP, Surat Tugas, Status Aktivasi BSrE (melalui verifikasi dengan petugas verifikator)

Skema Pencantuman Produk

16 MODE
HYBRID. BERTAHAP



START
KATEGORI LEVEL III

KATEGORI UMUM

Pilih

KATEGORI KHUSUS (MASTER DATA PENGELOLA)

MASTER PRODUK PENYEDIA

NON-MASTER PRODUK PENYEDIA

MASTER PRODUK PENYEDIA

NON-MASTER PRODUK PENYEDIA

PRIVAT

OFFICIAL VENDOR

PUBLIK

OFFICIAL VENDOR

NON-OFFICIAL VENDOR

PRIVAT

OFFICIAL VENDOR

PUBLIK

OFFICIAL VENDOR

NON-OFFICIAL VENDOR

KURASI

NON-KURASI

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

KURASI

NON-KURASI

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

Produk Tayang

LABEL : OV + VP (1)

LABEL : OV (2)

LABEL : OV + VP (3)

LABEL : OV (4)

LABEL : VP (5)

LABEL : - (6)

LABEL : VP (7)

LABEL : - (8)

LABEL : OV + VP (9)

LABEL : OV (10)

LABEL : OV + VP (11)

LABEL : OV (12)

LABEL : VP (13)

LABEL : - (14)

LABEL : VP (15)

LABEL : - (16)

Berlaku hanya untuk **Barang** dan sebagian **Jasa Lainnya**

Skema Pencantuman Produk

Kriteria Kurasi Data Produk



Proses kurasi produk sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing – masing pengelola Katalog

Kurasi Produk

- Kurasi terhadap kesesuaian Informasi TKDN
- Kurasi terhadap Kategori Produk
- Kurasi terhadap Perpajakan
- Kurasi kelengkapan informasi Spesifikasi Produk
- DLL

Skema Pencantuman Produk

Tampilan Daftar Produk Penyedia

Daftar Produk					Atur Sekaligus 	+ Tambah Produk	
Semua Produk					Tayang (35)	Menunggu Verifikasi	Tidak Tayang
Cari Nama Produk		Kategori 	Status Produk 				
Info Produk	Varian	Harga 	Stok	Produk Tayang			
 <p>Barang</p> <p>Axioo Mybook 3</p> <p>PPN 11%</p>	2	Rp 6.438.000	1.458	<input checked="" type="checkbox"/> Tayang	Atur 		
 <p>Barang</p> <p>Jasa Logistik</p>	-	Rp 9.500.000	9.695	<input checked="" type="checkbox"/> Tayang	Atur 		

SKEMA PENGELOLAAN **KATALOG.v6**

TERPUSAT - TERKOORDINASI

PENGELOLA KATALOG SEKTORAL [Kementerian/Lembaga]

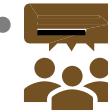


1. Usulan Koleksi Produk
2. Kurasi Koleksi Produk
3. Usulan Pembuatan Kategori Produk (Terbatas)
4. Kurasi Penayangan Produk (Terbatas)
5. Kurasi Label Produk (Terbatas)
6. Penyedia Data Master Produk (Kategori Khusus)

PENGELOLA KATALOG LOKAL [Pemerintah Daerah]



1. Usulan Koleksi Produk
2. Kurasi Koleksi Produk
3. Akuisisi Pelaku Usaha Lokal



PENGELOLA KATALOG PUSAT [LKPP + TELKOM]

1. Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik
2. Penyelenggaraan Sistem E-purchasing
3. Pembinaan & Dukungan Pengelolaan Katalog Elektronik

Account Platform and Operation
Data and Monitoring
Marketplace Transaction
Marketplace Discovery
Order Management
Budgeting and Payment
Public Engagement
Public Experience
Policy and Compliance

PENGELOLA KATALOG NASIONAL [LKPP + TELKOM]

1. Usulan Pembuatan Kategori Produk
2. Kurasi Penayangan Produk
3. Kurasi Label Produk



Perihal

KOLEKSI PRODUK

Koleksi produk merupakan cara untuk mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik atau kebutuhan tertentu



Koleksi Umum

- Dibuat oleh Pengelola Katalog Pusat
- Digunakan oleh Seluruh K/L/PD



Koleksi Kebutuhan Tertentu

- Diusulkan oleh K/L/PD
- Dibuat oleh Pengelola Katalog Pusat
- Dikurasi oleh K/L/PD Pengusul
- Digunakan oleh seluruh K/L/PD

Koleksi PDN ber
TKDN


Koleksi PDN + UMK

Koleksi Daerah



Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Detail Produk



Barang

Seragam Dinas

Terjual 11,2rb+

PDN

Rp 111.000

Termasuk PPN 11%

Pilih Warna

coklat hitam

Pilih Ukuran

S M L XL

Pilih Layanan Tambahan

- Jasa salon baju** PPN 11%
Rp11.100
jasa salon baju
- Laundry** PPN 11%
mulai dari Rp33.300
Laundry 1x Perminggu selama 1 bulan

Jumlah

- 1 + Tersisa: **94.354 Pcs**

Min. pembelian 1 Pcs

[Tambah Catatan](#)

Harga Produk (1)	Rp111.000
Subtotal	Rp111.000

⚠ Selama masa uji coba Katalog Elektronik V6, metode pembayaran hanya dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) dengan batas maksimal Rp200.000.000. Informasi lebih lanjut akan diumumkan di kemudian hari.

+ Tambah Keranjang

Beli Langsung

Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Detail Negosiasi

← Negosiasi Harga

Nego Harga Produk & Layanan Tambahan

Sepakati harga terbaik untuk setiap produk dan layanan tambahan yang Anda pesan.



Barang

Seragam Dinas

1 Pcs (100 gr)

Harga Satuan : **Rp 111.000**

DPP : Rp 100.000

PPN 11% : Rp 11.000

DPP Kesepakatan : -

Termasuk PPN 11%

Lihat harga jual terendah

Nego Harga Sebelum Pajak (DPP)

Rp

Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum Nego [ⓘ] Rp 168.109

Anda Hemat Sebesar Rp 0

Total Harga Akhir -

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) yang berlaku di Katalog Elektronik.

Ajukan Nego

Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Fitur Chat Saat Negosiasi

< Detail Pesanan Negosiasi

Negosiasi Diajukan Pembeli Lihat Detail

Otomatis Batal 🕒 26 Agu 2024, 23:46 WIB

Tanggal Pesanan 21 Agu 2024, 23:46:27

Nomor Pesanan #EP-01J5TXA7MQ5P8ZRC8TTF5NV610

Lihat Riwayat Nego

Chat Penyedia

Bantuan

Batalkan Nego

Chat

Cari percakapan atau ...

Company A 1 mnt
EP-01J5TXA7MQ5P8ZR...

INNOVASI DI... 08 Agu 2024
silahkan segera diresp...

HELMİYATI 07 Agu 2024
Bisa kah produk langsu...

Persona Co... 13 Jun 2024
Halo, pak/bu apakah p...


Persona Co... 14 Mei 2024
Halo, pak/bu produk m...

Company A Offline

Percakapan ini akan direkam dan dimonitor oleh Sistem. 13:30

stok ready? 13:30

ready 13:39



#EP-01J5TXA7MQ5P8ZRC8TTF5NV610
Seragam Dinas
Rp3.029.190


Apakah nego tersedia untuk produk ini? 23:48

Halo, pak/bu ap... Apakah nego te... Bisa kah produk... Terima kasih!

Tulis pesan di sini..

Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Surat Pesanan dengan Tanda Tangan Digital



← Surat Pesanan - #EP-01J5T0595YJ2XCF6PPXP8MVHM3

Anda menandatangani berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia dengan BSRé. Penerima dokumen ini perlu melakukan verifikasi identitas untuk melanjutkan penandatanganan.

Asuransi Pengiriman <small>RPN 22%</small>	Rp36.000	Rp10.560	Rp106.560	-	Rp106.560
Total Harga					Rp43.372.140

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan elektronik dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

PT. AMTEK SOLUSINDO

Persona PPK

Persona PPK A
Pejabat Pembuat Komitmen

Persona Company A
Direktur


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRé-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

< 1 dari 1 halaman > 🔍 100% 🔍 **Lihat Detail Pesanan**

Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Tanda Tangan Digital dan Materai Digital


[Melalui Negosiasi](#)

Nama Produk	Harga DPP	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
 Barang PDN mac book air 2 pcs (2.106 gr) PPN 11% https://buyer-praproduction.eproc.dev/anapahot-product?orderid=015T0505YJ2XC76PPXP8MVMH3&orderKey=7e3d50f-0700-4eed-e638-201d882cb0f8&productId=98e463d1-195b-495e-94ee-086e04bfc88	Rp19.200.000	Rp2.112.000	Rp21.312.000	2	Rp42.624.000
Pengiriman					
Ongkos Kirim (JNE Express - 2.11 kg) PPN 11%	Rp578.000	Rp63.580	Rp641.580	-	Rp641.580
Asuransi Pengiriman PPN 11%	Rp96.000	Rp10.560	Rp106.560	-	Rp106.560
Total Harga					Rp43.372.140


Surat Pesanan Ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan Ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan Ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan elektronik dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan Ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui **Syarat dan Ketentuan** pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/pt-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Persona PPK A
Pejabat Pembuat Komitmen



PT. AMTEK SOLUSINDO



Persona Company A
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Halaman Lacak Pengiriman

Informasi Pengiriman

Status: Menunggu Penjemputan oleh Kurir

Cetak Label Lacak Pengiriman

Info | Dokumen Penagihan

Kurir JNE - Express	Perlu Dikirim Sebelum 21 Agustus 2024, 07:00	Estimasi tiba ⓘ -
------------------------	---	----------------------

Nama Penerima : ANTON (62808799907978)
Permintaan Tiba : 22 Agustus 2024
Alamat Pengiriman : Telkom STO Kebayoran Selong Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Dki Jakarta 12110
Titik Lokasi : Maps
Catatan Pengiriman : -

Lacak

Kurir : **Penyedia**
Nama Supir : **Limpik**
Nama Penerima : **ANTON**
Nomor Resi : **SE.12121212**

Nomor Kendaraan : **BA51K**
Tanggal Dikirim : **21 Agu 2024 16:04:53**
Permintaan Tiba : **30 Agu 2024**
Estimasi Tiba : **22 Agt 2024 - 4 Sep 2024**

Penyedia
lengkap
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Pembeli
ANTON
Telkom STO Kebayoran, Selong, Kebayoran Baru, KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12110

Pesanan Tiba
Paket sudah diterima oleh ANTON
21 Agu 2024 16:12 WIB

Pesanan Telah Dikirim
Paket telah dikirim oleh Limpik
21 Agu 2024 16:04 WIB

Skema Purchasing Katalog V6

Tampilan Halaman Pembayaran Digital


Daftar Pesanan

Semua **Berlangsung** Selesai Dibatalkan Adendum

Cari nomor pesanan, nama produk atau... Urutkan Menunggu Pembayaran Reset

EP-01HRE12NK1TGN1739RT0BD40Z1 • 08 Mar 2024 10:25 WIB • [Persiapan Pembayaran](#) [Menunggu Pembayaran](#)

CA Company A

 **Seragam Dinas**
500 Pcs x Rp 99.900
+3 barang lainnya

Penyedia
Company A
[UMKK](#)

Metode Pembayaran
Pembayaran Langsung

Total Harga
Rp 201.465.000
Melalui Negosiasi

[Lihat Detail](#) [Lanjutkan Pembayaran](#)

Kartu Kredit Pemerintah

Simulasi Pembayaran

VISA
Nomor Kartu 4811 1111 1111 1114, Masa berlaku 01/25, CVV 123

MASTERCARD
Nomor Kartu 5211 1111 1111 1117, Masa berlaku 01/25, CVV 123

Nomor Kartu

Masa Berlaku Nomor CVV

Ringkasan Pembayaran

Total Pembelian	Rp84.750.000
Total Ongkos Kirim	Rp0
Total Pembayaran	Rp84.750.000

[Lihat Detail](#) [Lanjutkan Pembayaran](#)

Bayar



PROFIL
TRANSAKSI KOTA MALANG

POTENSI PENGADAAN PEMERINTAH

SEMAKIN MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN

TREN TOTAL RENCANA UMUM PENGADAAN



Setiap

Rp 400T

Belanja PDN

Akan berdampak pada:



2 Juta

Tenaga Kerja

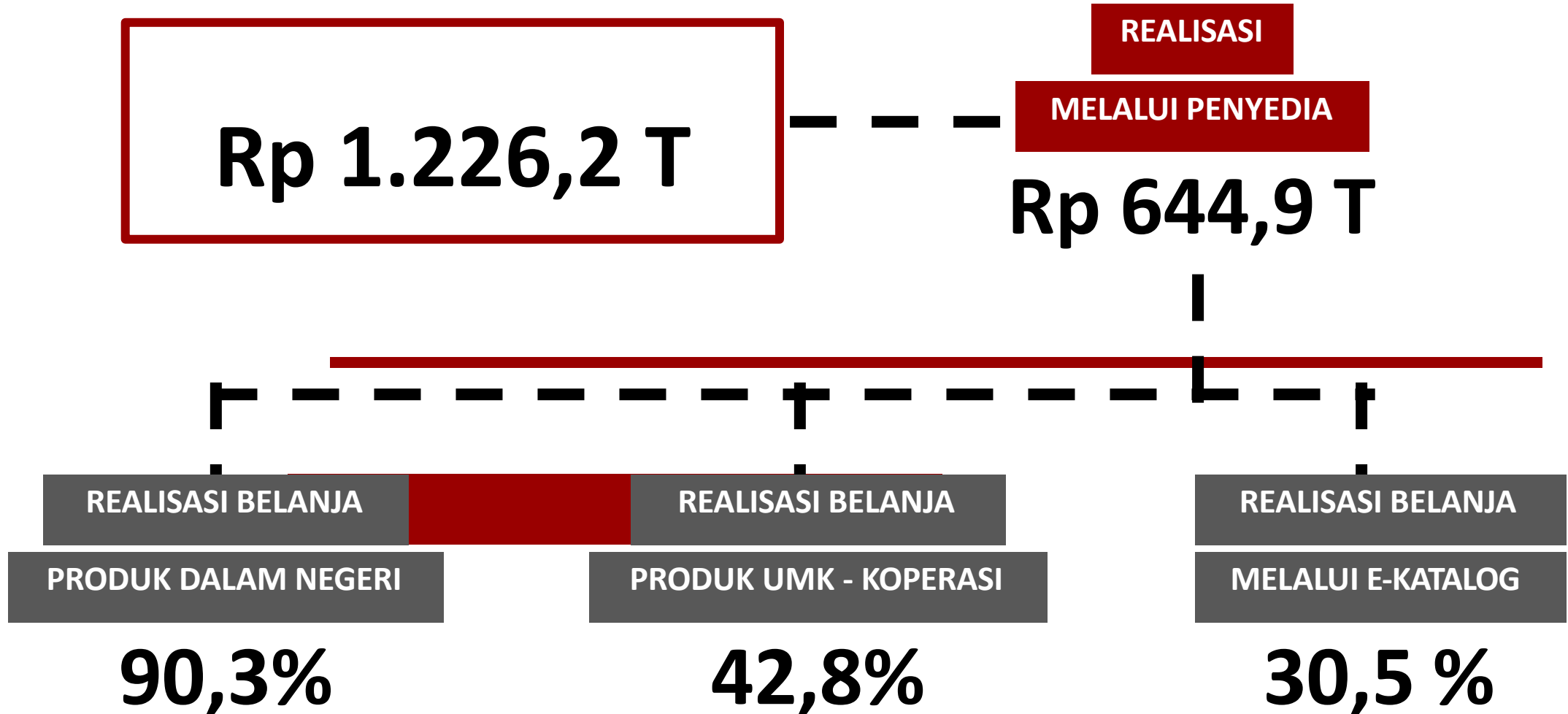


Mengungkit
Pertumbuhan
Ekonomi

1,5%-1,8%

REALISASI PENGADAAN PEMERINTAH 2023

UNTUK BELANJA PDN, PRODUK UMK-K, dan PEMANFAATAN E-KATALOG



MONITORING PBJ KOTA MALANG




TAHUN 2023 - 2024

TUTUP TAHUN 2023

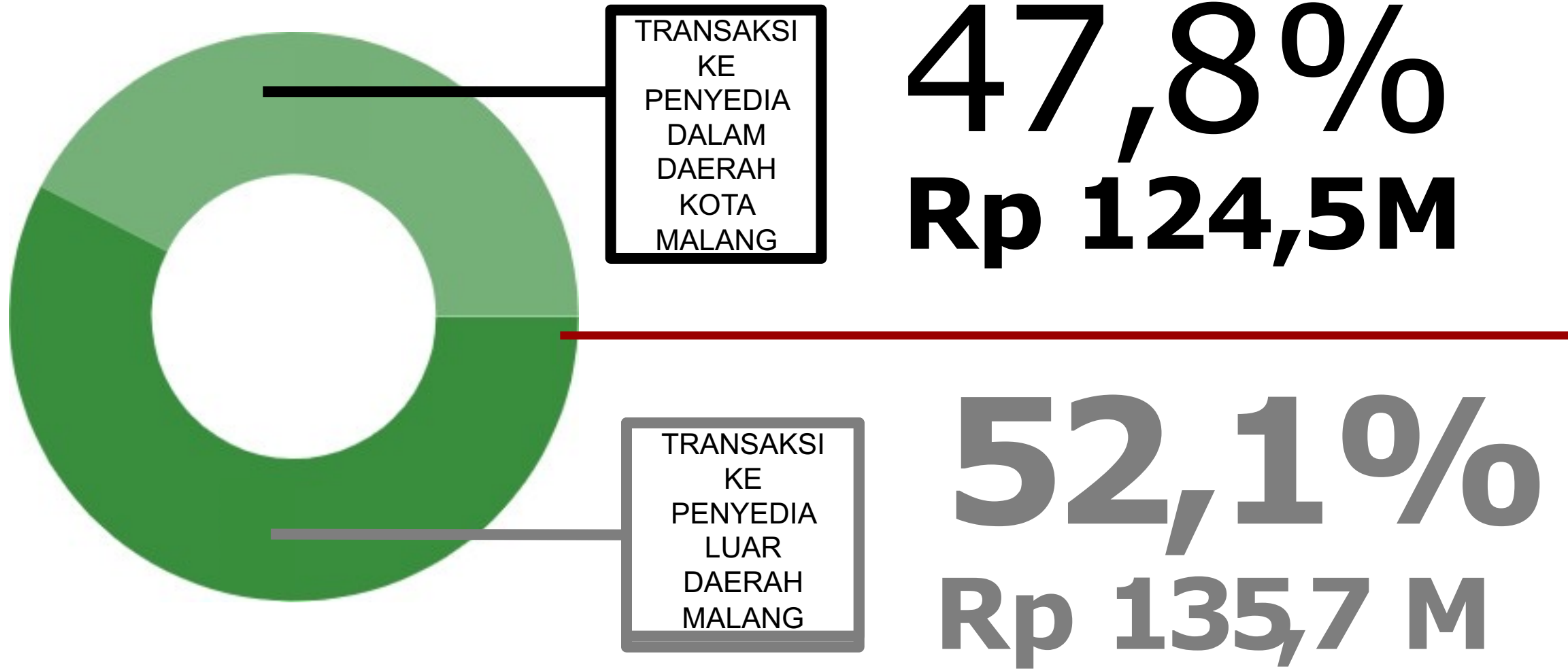
TOTAL RUP : Rp 2.028 M
REALISASI PENYEDIA : Rp 684 M

TAHUN BERJALAN 2024 (20 Agustus 2024)

TOTAL RUP : Rp 1.548 M
REALISASI PENYEDIA : Rp 338 M

		TOTAL RP REALISASI	% TERHADAP REALISASI PENYEDIA	TOTAL RP REALISASI	% TERHADAP REALISASI PENYEDIA
	Realisasi PDN AMANAHAH INPRES 2/2022 ≥ 95%	Rp 644,2 M	94,18%	Rp 329,2 M	97,28%
	Realisasi UMK-K AMANAHAH INPRES 2/2022 ≥ 40%	Rp 488,1 M	71,34%	Rp 232,5 M	68,63%
	Realisasi E-PURCHASING SESUAI SE KEPALA LKPP 3/2023 ≥ 30%	Rp 301,8 M	44,13%	Rp 251,3 M	74,27%

IDENTIFIKASI ASAL PENYEDIA E-KATALOG PADA TRANSAKSI PEMKOT MALANG 2023



TRANSAKSI
KE
PENYEDIA
DALAM
DAERAH
KOTA
MALANG

47,8%
Rp 124,5M

TRANSAKSI
KE
PENYEDIA
LUAR
DAERAH
MALANG

52,1%
Rp 135,7 M

Penilaian Final

INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2023

K/L/Pemda: Kota Malang

(1) ▾

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

SIRUP

Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ

Skor Max: 10
Persentase: 100,00%
Skor saat ini: 10,00

Jika $\geq 50\%$ maka dikali 1,0
Jika $\geq 80\%$ maka skor 0

Basis data RUP TA 2022
Penarikan data 1 April 2023

*data per 01 April 2023

ePurchasing

Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik)

Skor Max: 4
Persentase: 11,00%
Skor saat ini: 0,00

Jika $\geq 50\%$ maka dikali 4
Jika $\geq 80\%$ maka skor 0

Basis data Katalog Elektronik TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

non eTendering/ non ePurchasing

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

Skor Max: 5
Persentase: 41,15%
Skor saat ini: 0,00

Jika $\geq 50\%$ maka dikali 5
Jika $\geq 80\%$ maka skor 0

Basis data SPSE (transaksional & pencatatan) dan RUP TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

Skor total
19,64

Skor Max
30

Bobot
30%

eTendering

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering

Skor Max: 5
Persentase: 80,11%
Skor saat ini: 4,01

Jika $\geq 50\%$ maka dikali 5
Jika $\geq 80\%$ maka skor 0

Basis data Realisasi dan RUP TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

Toko Daring

Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring

Skor Max: 1
Nilai: 1,00
Skor saat ini: 1,00

Jika sudah pernah skor 1
Jika belum pernah skor 0

Basis data Toko Daring TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

eKontrak

Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional

Skor Max: 5
Persentase: 92,72%
Skor saat ini: 4,64

Jika $\geq 20\%$ maka dikali 5
Jika $\geq 20\%$ maka skor 0

Basis data SPSE TA 2022
Penarikan data 31 Januari 2023

Skor ITKP
78,00



Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ

Skor saat ini
22,80

Skor Max
30

Bobot
30%

*data per 31 Oktober 2023

Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Skor saat ini
35,56

Skor Max
40

Bobot
40%

*data per 31 Oktober 2023

Uraian Jumlah Paket Purchasing

NO	Status Paket Purchasing	Jumlah Paket
1	Proses Kontrak dengan PPK	339 Paket
2	Pengiriman dan Penerimaan	1.649 Paket
3	Verifikasi Penyelesaian Paket	5 Paket
4	Paket Selesai	1.023 Paket
TOTAL		3.016 Paket



AKHIR PRESENTASI

TERIMA KASIH

Direktorat Pasar Digital Pengadaan
Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital

